

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah utama bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri pada zaman modern sekarang ini pun kemiskinan di kalangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Suparlan (dalam Pratama, 2014) mendefinisikan kalau kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan harta serta barang berharga yang dialami seorang ataupun sekelompok orang yang hidup dalam area serba miskin ataupun kekurangan modal, baik dalam penafsiran duit, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, ataupun akses terhadap sarana pelayanan universal, peluang berupaya serta bekerja.

Sulistiyani (Pairan, 2015 : 294) menyatakan bahwa kemiskinan secara ekplisit merupakan selaku fenomena, hendak melihat bagaimana upaya warga dalam memenuhi kebutuhan, serta hingga sejauh mana upaya tersebut sanggup mencapai apa yang di idamkan. Nuansa penanggulangan kemiskinan sepanjang ini masih sangat diwarnai oleh pemikiran semacam ini. Oleh sebab itu, banyak program pengentasan kemiskinan cuma terfokus pada bagaimana keahlian warga dalam memenuhi kebutuhannya, bukan mencari jalur keluar buat meringankan beban kemiskinan dengan lewat usaha tingkatan keahlian secara bertahap. Maka

dari itu, diperlukannya terobosan-terobosan baru agar penanggulangan kemiskinan di akan lebih optimal dan bisa menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi hingga saat ini.

Di Indonesia kasus kemiskinan ini juga senantiasa jadi pembicaraan yang sangat menarik, sebab kemiskinan mempengaruhi jalannya perekonomian di negeri ini. Nyaris bermacam golongan di Indonesia baik para akademisi, lembaga legislatif, eksekutif, pengusaha ataupun masyarakat tentu mangulas permasalahan ini. Tidak hanya itu banyak pula tokoh ilmuwan ataupun akademisi dari dulu hingga saat ini yang menghasilkan teori, konsep ataupun pendekatan tentang kemiskinan supaya tiap tahunnya angka kemiskinan turun. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak awal keberadaan umat manusia. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih harus terus dikembangkan. Karena terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan

Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini dikarenakan masalah kemiskinan ini telah ada sejak lama dan tetap ada hingga sekarang masih dirasakan sebagian besar masyarakat saat ini, bahkan saat ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu kemiskinan juga semakin parah ketika kita membahas ke tingkat-tingkat bawah, seperti di daerah-daerah terpencil, tapi tidak bisa dipungkiri lagi angka kemiskinan di kota-kota besar juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. maka

dari itu, kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang sulit untuk di hindari. Tapi bukan berarti tidak bisa di atasi, hanya saja kenyataannya pemerintah dan juga dinas-dinas terkait masih kesulitan mengatasinya.

Kemiskinan ialah permasalahan utama negara yang lagi membangun termasuklah Indonesia, dimana penanggulangannya harus dilakukan dengan serius, kreatif, komprehensif serta berkelanjutan. Kasus kemiskinan ialah hal yang serius yang lagi dialami serta ditanggulangi oleh Indonesia. Terbentuknya kemiskinan serta permasalahan sosial disebabkan oleh faktor internal serta aspek eksternal. Aspek internal, ialah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup tiap harinya, Setelah itu factor eksternal ialah kebijakan publik yang belum berpihak kepada warga miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial sehingga terjadinya kesenjangan, serta ketidakadilan.

Tapi, tidak hanya di Indonesia kemiskinan juga menyerang negara-negara di belahan dunia lain, begitu juga negara-negara maju di Eropa. Oleh sebab itu, penanganan kemiskinan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya Kerjasama dari berbagai pihak.

Eko Suharto (Hafsah, 2008) mengatakan bahwa konsep kemiskinan didominasi oleh satu sudut pandang, yakni “kemiskinan pendapatan” Yang mana pemahaman semacam ini di kritik Sebagian besar pakar. Sebab, tidak bisa menggambarkan potret kemiskinan secara utuh. Sedangkan, seperti yang kita ketahui kemiskinan menimbulkan dampak yang banyak ke dalam segala bidang.

Sedangkan menurut sosiolog E.J. Habsbown (Hafsah, 2008) kemiskinan merupakan “*Poverty has always had several not entirely severable meaning and is*

*always defined according to the conventions of the society in which it occurs.*” Yang berarti kemiskinan itu tidak selalu diartikan dengan kemiskinan itu sendiri, akan tetapi dapat digambarkan menurut apa yang terjadi di masyarakat.

Data terbaru kemiskinan di Indonesia cukup membuat nafas sedikit lega pasalnya jumlah penduduk miskin sedikit mengalami penurunan dari tahun lalu. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Sedangkan untuk persentasenya penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021 (data BPS). Tapi hal ini berbanding terbalik dengan keadaan penduduk miskin di Kepulauan Riau dan juga Kota Tanjungpinang yang terus mengalami peningkatan dan tahun sebelumnya. Itu membuktikan bahwa pemerataan program maupun kebijakan penanganan kemiskinan belum tersebar merata dan dapat dikatakan belum optimal.

Menurut Narayan, dkk (Pairan, 2015) bahwa yang membuat kemiskinan itu sulit ditangani adalah sifatnya yang tidak saja mempengaruhi segala aspek kehidupan tetapi juga saling berkaitan; dinamis, kompleks, sarat dengan sistem institusi (konsensus sosial), gender dan peristiwa yang khas per lokasi.

Kemiskinan sendiri bisa dialami di daerah mana saja tanpa memandang hal-hal tertentu. Baik di ibukota provinsi maupun di kota-kota terpencilnya. Karena dalam hal ini pemerintah setempat melalui dinas-dinas terkait harus bersikap cepat dalam menangani masalah ini agar tidak semakin meluas dan juga harus tepat sasaran dalam menjalani program-program yang telah di susun dalam upaya

mempercepat menekan angka kemiskinan setiap tahunnya. Upaya-upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di suatu daerah di Indonesia hingga sekarang terus berlanjut. Berbagai cara pun telah dilakukan, tapi memang lagi-lagi harus ditekankan masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks terbukti dengan seluruh provinsi di Indonesia mengalami hal yang serupa dengan data yang berbeda-beda pula.

Upaya-upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di suatu daerah di Indonesia hingga sekarang terus berlanjut. Berbagai cara pun telah dilakukan, tapi memang lagi-lagi harus ditekankan masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks terbukti dengan seluruh provinsi di Indonesia mengalami hal yang serupa dengan data yang berbeda-beda pula.

Dalam pasal 1 Peraturan Presiden No 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dijelaskan bahwa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam pasal diatas jelas bahwasannya penanggulangan kemiskinan menjadi tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga bisa dibantu oleh dinas-dinas terkait. Penanggulangan kemiskinan juga bisa dilakukan dengan berbagai car baik itu membuka lapangan kerja, menggalakkan dunia usaha maupun melalui program-program bantuan yang telah terdata secara resmi dengan menggunakan data-data yang valid tentunya.

Selain itu dalam Permensos No 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosisal Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada pasal 6 dijelaskan bahwa sebagai berikut :

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:

- a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- b. program pemberdayaan sosial;
- c. program rehabilitasi sosial;
- d. program perlindungan dan jaminan sosial;
- e. program penanganan fakir miskin; dan
- f. program pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial.

Jelas bahwa pada Permensos ini dijelaskan program-program yang telah dirancang Bersama pemerintah pusat maupun dengan kementerian sosial dalam hal ini dilimpahkan kepada Dinas Sosial setempat harus menjalankan program yang sebagaimana tercantum dalam Permensos tersebut dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan. Ini berarti semua stakeholder harus berekerjasama mengatasi masalah ini karena masalah ini begitu kompleks dan melibatkan banyak unsur. Dalam permensos itu pula diatur bagaimana program-program yang dibawah

naungan Kementerian Sosial salah satunya untuk penanganan fakir miskin. Hal ini semakin menguatkan bahwa Kementerian Sosial atau Dinas Sosial memang menjadi salah satu instansi atau Lembaga yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup fakir miskin.

Seperti yang kita ketahui data terakhir melalui sensus penduduk BPS tahun 2020 bahwa jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang ini berjumlah sekitar 227.663 jiwa, dapat dilihat pada tabel di bawah, yang mana tersebar dalam 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang**

Kecamatan	Jumlah Penduduk di Kota Tanjungpinang tahun 2021
Bukit Bestari	54.599
Tanjungpinang Timur	114.875
Tanjungpinang Kota	19.512
Tanjungpinang Barat	44.381
Tanjungpinang Kota	233.367

Sumber (BPS Kota Tanjungpinang)

Selain itu, kita ketahui Bersama dan bisa kita lihat data dari BPS Kota Tanjungpinang bahwa angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data terbaru yang diambil dari tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan tapi peningkatan ini jika lama kelamaan di

biarkan juga akan menjadi peningkatan yang berakhir dengan kekhawatiran bahwa pemerintah setempat dan dinas terkait gagal dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam menjalankan program-programnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang serta Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Riau dapat diamati pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 2 Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Dalam Jiwa)**

Kepulauan Riau	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2021	2020	2019
Provinsi Kepulauan Riau	144.46	131.97	128.46
Kabupaten Karimun	16.28	15.99	15.36
Kabupaten Bintan	10.54	10.21	10.14
Kabupaten Natuna	3.98	3.47	3.43
Kabupaten Lingga	12.58	12.45	11.56
Kabupaten Kepulauan Anambas	3.08	2.8	2.72
Kota Batam	77.17	67.06	66.21
Kota Tanjungpinang	20.85	19.98	19.05

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

Pada tabel berikutnya, dapat diperoleh informasi bahwasannya dari segi persentase penduduk miskin dengan seluruh penduduk yang ada di Kota Tanjungpinang juga mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada 3 tahun terakhir persentase penduduk miskin berada di angka 9% dari keseluruhan penduduk di Kota Tanjungpinang. Walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan, namun harus tetap menjadi fokus utamanya ialah data ini harus turun ditahun berikutnya.



**Tabel 1. 3 Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Dalam Persen)**

Kepulauan Riau	Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2020	2019	2018
Provinsi Kepulauan Riau	5.92	5.9	6.2
Kabupaten Karimun	6.83	6.61	6.9
Kabupaten Bintan	6.36	6.37	6.61
Kabupaten Natuna	4.43	4.42	4.68
Kabupaten Lingga	13.85	12.88	13.55
Kabupaten Kepulauan Anambas	6.56	6.44	6.93
Kota Batam	4.75	4.85	5.11
Kota Tanjungpinang	9.37	9.03	9.24

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data-data yang ada Kota Tanjungpinang yang sekaligus Ibukota Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan kedua dalam persentase jumlah penduduk miskin di bawah Kabupaten Lingga. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah setempat maupun bagi dinas terkait dalam hal ini saya mengerucutkan ke Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk lebih memaksimalkan program-program yang telah ada dan menjadi tepat sasaran ke depannya dengan harapan angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Selain data di atas, terdapat juga data-data lainnya tentang kemiskinan di Kota Tanjungpinang seperti berikut ini :

**Tabel 1. 4 Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang (2017-2021)**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	598.631	19,19	9,29
2018	625.473	19,29	9,24
2019	659.170	19,05	9,03
2020	691.738	19,98	9,37
2021	719.776	20,85	9,57

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang (Tanjungpinang dalam angka 2022)

Dapat dilihat dari data di atas bahwasannya, data jumlah penduduk miskin serta persentasenya di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terkhusus untuk lima tahun terakhir begitu pula garis kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Selain data tersebut juga terdapat data lain yang berkaitan dengan kemiskinan di Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

**Tabel 1. 5 Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang (2017-2021)**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan</b>	<b>Indeks Keparahan kemiskinan</b>
(1)	(2)	(3)
2017	1,76	0,48
2018	1,49	0,38
2019	1,15	0,23
2020	1,58	0,40
2021	1,75	0,52

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang (Tanjungpinang dalam angka 2022)

Dalam hal indeks kedalaman kemiskinan dapat diartikan sebagai berikut : Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (BPS Tanjungpinang).

Dalam hal indeks keparahan kemiskinan dapat diartikan sebagai berikut : Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (BPS Tanjungpinang).

Seperti yang kita ketahui Bersama kota Tanjungpinang merupakan sendiri merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu kota Tanjungpinang harus bisa menjadi contoh bagi kota/kabupaten lainnya yang ada di provinsi Kepulauan Riau, dengan terus bertambahnya angka kemiskinan tentu saja membuat image ibukota yang melekat di Tanjungpinang akan tercoreng semakin tinggi pula angka kemiskinan tentu saja menggambarkan banyak masalah kesejahteraan sosial yang masih di alami kota Tanjungpinang itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya Langkah konkret dengan memperbanyak program-program pengentasan kemiskinan, yang salah satunya seperti yang kita ketahui berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Selain itu, di dalam renstra Dinas Sosial kota Tanjungpinang juga disebutkan bahwa BPNT ini sendiri merupakan salah satu program unggulan yang betul-betul harus disukseskan, di dalam renstra tersebut terdapat dua program yang

berkaitan dengan BPNT yaitu, kegiatan penunjang operasional BPNT untuk rumah tangga sasaran dan program berikutnya yaitu, kegiatan BIMTEK pengelolaan usaha bagi pengelola e-warung (e-warung sendiri merupakan elemen pendukung yang tidak bisa dipisahkan dari BPNT).

Selain masalah tersebut, di dalam renstra juga dipaparkan salah satu masalah yaitu, masih kurangnya pemberdayaan PMKS berbasis pada pengembangan usaha ekonomi produktif. Dengan adanya BPNT ini diharapkan timbulnya kesadaran-kesadaran yang berjiwa berwirausaha yang tinggi, karena salah satunya hal tersebut bisa terwujud dengan adanya bimbingan terhadap pengelola e-warung yang menjadi pusat distributor penyaluran bantuan pangan ini.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan dunia global meresponnya dengan menyepakati suatu ide pada September 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDG's). (Ishartono & Santoso, 2021) Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015.

Berakhirnya era MDGs yg berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya ketika memasuki era SDGs (Sustainable Development Goals) yang biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan, yang dimulai dengan pertemuan yg dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas akbar PBB (liga Bangsa-Bangsa), New York, Amerika serikat. acara tersebut merupakan aktivitas seremoni ratifikasi dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) dihadiri wakil yang berasal 193 negara.

Didalam konsep menghapus kemiskinan maka SDGs terdapat buat mengatasi kemiskinan yg ekstrim dimana hingga saat ini masalah tadi artinya tantangan global yg paling harus diperhatikan. Menurut Wahyuningsih (Bhayu Pratama et al., 2020). Dalam penelitian ini terfokus pada poin SDGs yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Yang mana poin ini memiliki target dan metadata indikator sebagai berikut :

#### **Target SDGs poin 1 (Tanpa Kemiskinan)**

- 1) Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
- 2) Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 3) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- 4) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- 5) Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana

- Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
- Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Dalam mengatasi hal ini Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sudah memanageremni semua program-programnya di dalam suatu dokumen yang kita sebut dengan rencana startegis (renstra) yang adalah pedoman dalam melaksanakan tugas utama dan fungsi Dinas Sosial selama 5 tahun ke depan dan akan dijabarkan ke pada planning Kerja Tahunan. Renstra ini disusun mengacu hal-hal di dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015 - 2019, Renstra Dinas Sosial Provinsi, planning rapikan Ruang daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019, serta yang akan terjadi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 (Renstra Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2019)

Salah satu program pemerintah yang dilimpahkan langsung ke Dinas Sosial yaitu sebuah program yang telah kita ketahui Bersama yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai atau yang disingkat dengan BPNT. Data jumlah Keluarga Penerima Manfaat program BPNT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 6 Tabel Jumlah KPM Penerima BPNT (data tahun 2022)**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah KPM	Jumlah Total KPM
1.	Bukit Bestari	Dompok	110	1.444
2.		Sungai Jang	238	
3.		Tanjung Ayun Sakti	193	
4.		Tanjung Pinang Timur	297	
5.		Tanjung Unggat	606	
6.	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	119	738
7.		Penyengat	197	
8.		Senggarang	343	
9.		Tanjungpinang Kota	79	
10.	Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	412	1.861
11.		Kampung Baru	430	
12.		Kamboja	502	
13.		Tanjungpinang Barat	517	
14.	Tanjungpinang Timur	Air Raja	451	2.804
15.		Batu IX	752	
16.		Melayu Kota Piring	515	
17.		Pinang Kencana	753	
18.		Kampung bugis	333	
	Total			6.847 KPM

Sumber : Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Tujuan pembangunan nasional salah satunya membahas tentang kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang kongkrit agar tujuan tersebut bisa tercapai. Langkah-langkah kongkrit tadi tercermin di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 129/HUK/2008 ihwal standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial daerah Provinsi serta wilayah Kabupaten/Kota, artinya menjadi ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar bidang sosial yang termasuk didalamnya urusan daerah yang berhak diperoleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara aporisma. PMKS yang dimaksud adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Jenis-jenis penyandang PMKS (Renstra Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2019) ada 26 jenis termasuk di dalamnya fakir miskin yaitu, orang yang sama sekali yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya

Dari data diatas Fakir miskin termasuk ke dalam program dan juga tanggungjawab dari Pemerintah setempat yang dilimpahkan kepada Dinas terkait yaitu salah satunya dalam hal ini Dinas Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial juga menjadi salah satu dinas yang bertanggungjawab untuk menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan dan program-program yang mereka buat. Dari permasalahan dan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk dijadikan skripsi yang berjudul :



## **“Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini terfokus pada masalah yang akan diteliti penulis yaitu “Bagaimanakah Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2022?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2022?”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan kajian atau penelitian lanjutan terkait dengan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangan akademik bagi program studi Ilmu Pemerintahan dan dapat berguna sebagai sarana untuk mengembangkan teori dan konsep tentang bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)
- b. Manfaat bagi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang.
- c. Manfaat bagi masyarakat adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam pengentasan kemiskinan.